

PILKADA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Meskipun DIY tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur, hal tersebut tidak lantas membuat D.I Yogyakarta sama sekali tidak menyelenggarakan Pilkada di tahun 2017. Pada pilkada serentak 2017 tersebut, terdapat satu kota dan satu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada. Kedua daerah tersebut adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Pilkada di Kota Yogyakarta diselenggarakan dengan anggaran pengawasan sebesar Rp 4.218.695.000,00. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo, Pilkada diselenggarakan dengan anggaran pengawasan sebesar Rp 2.979.549.000,00. Jumlah yang diterima oleh masing-masing daerah tersebut besarnya adalah sama dengan jumlah yang diajukan oleh masing-masing daerah. Pencairan anggaran pengawasan di kedua daerahpun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berkaitan dengan jumlah pengawas pemilu di kedua daerah ini, jumlah keseluruhan pengawas pemilu di semua tingkatan adalah 884 pengawas di Kota Yogyakarta dan 1064 di Kabupaten Kulon Progo. Dari jumlah tersebut, di Kota Yogyakarta, 313 di antaranya adalah pengawas perempuan. Sementara itu di Kabupaten Kulon Progo 302 di antaranya adalah pengawas perempuan. Keterwakilan perempuan dalam pengawas

pemilu di kedua daerah ini sudah cukup baik yang dibuktikan dengan hadirnya perempuan sebagai pengawas pemilu di setiap tingkatan, dari mulai tingkat provinsi hingga pengawas TPS.

Sementara itu, dilihat dari hasil pengawasan terkait dengan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, sengketa, dan pelanggaran, tidak ditemukan dan dilaporkan satupun kasus terkait dengan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara. Di kedua daerah ini tidak ditemukan adanya sengketa pencalonan. Namun, khususnya di Kota Yogyakarta, dilaporkan terdapat satu kasus sengketa hasil pemilu. Hasil penindakan yang dilakukan oleh pengawas pemilu atas beberapa dugaan pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa terdapat 23 kasus pelanggaran administrasi di Kota Yogyakarta dan 21 kasus yang sama di Kabupaten Kulon Progo, tiga pelanggaran etik di Kota Yogyakarta, empat pelanggaran hukum lainnya di Kota Yogyakarta, tiga pelanggaran hukum lainnya yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan terkait pelanggaran pidana, baik di Kota Yogyakarta maupun di Kabupaten Kulon Progo tidak ditemukan data terkait laporan maupun temuan atas pelanggaran ini.



PROVINSI DI YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 2 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 4.218.695.000,-

Yang Disetujui

Rp 4.218.695.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0



DATA PEMILIH

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| DPT | Laki-laki | 143.307 |
| | Perempuan | 155.682 |
| DPTb | Laki-laki | 1.025 |
| | Perempuan | 1.184 |
| DPPh | Laki-laki | 432 |
| | Perempuan | 384 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Jumlah Pemilih Pemula | 8.536 |
| Jumlah Pemilih Disabilitas | 837 |
| Jumlah Pemilih TMS | 0 |

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPH | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 97.166 | 113.771 | 1.025 | 1.184 | 369 | 319 | | | 199.479 | 14.355 | 340 | 70,90% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 0 |
| Mobilisasi PNS | 0 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 0 |
| Kampanye Masa Tenang | 0 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 12 | 25 | 20 | 514 | 280 |



| | |
|----------------------|---|
| Pencalonan (Tahapan) | 0 |
| SENGKETA | |
| Hasil | 1 |

PELANGGARAN

| | | | | | | | |
|--------------------------|----|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Pelanggaran Administrasi | 23 | Pelanggaran Pidana | 0 | Pelanggaran Etik | 3 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 4 |
|--------------------------|----|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|



PROVINSI DI YOGYAKARTA

Kabupaten Kulon Progo



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 2 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 2.979.549.000,-

Yang Disetujui

Rp 2.979.549.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0



DATA PEMILIH

| | | |
|------|-----------|---------|
| DPT | Laki-laki | 161.348 |
| | Perempuan | 170.863 |
| DPTb | Laki-laki | 376 |
| | Perempuan | 624 |
| DPPh | Laki-laki | 335 |
| | Perempuan | 391 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Jumlah Pemilih Pemula | 8.621 |
| Jumlah Pemilih Disabilitas | 1.172 |
| Jumlah Pemilih TMS | 0 |

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPh | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 125.543 | 137.607 | 376 | 624 | 334 | 390 | 126.253 | 138.621 | 257.517 | 7.357 | 331 | 79,20% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 0 |
| Mobilisasi PNS | 0 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 0 |
| Kampanye Masa Tenang | 0 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 9 | 71 | 17 | 663 | 274 |



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 21

Pelanggaran Pidana 0

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 3

PILKADA DI JAWA TIMUR

Pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2017, di Provinsi Jawa Timur terdapat satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kota Batu. Anggaran pengawasan yang di terima oleh Panwas Kota Batu adalah sebesar Rp 2,9 miliar. Anggaran tersebut sama dengan anggaran yang diajukan oleh Panwas Kota Batu. Pencairan anggaran tersebut dilaksanakan tepat waktu.

Berkaitan dengan jumlah personel pengawas pemilu, jumlah keseluruhan pengawas dari mulai tingkat Kota hingga TPS adalah 456 pengawas. Dari jumlah tersebut, dua diantaranya adalah perempuan. Sementara itu berdasarkan hasil pengawasan, dugaan pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Kota Batu mencakup enam kasus dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara, dan dua kasus dugaan praktik politik uang. Berdasarkan pada temuan dan laporan tersebut, pengawas pemilu telah menindak sesuai aturan yang berlaku sembilan kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.



PROVINSI JAWA TIMUR

Kota Batu



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 1 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 2.900.000.000,-

Yang Disetujui

Rp 2.900.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0



DATA PEMILIH

| | | | | |
|------|-----------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| DPT | Laki-laki | 73.631 | Jumlah Pemilih Pemula | 4.135 |
| | Perempuan | 74.339 | | Jumlah Pemilih Disabilitas |
| DPTb | Laki-laki | 755 | Jumlah Pemilih TMS | |
| | Perempuan | 895 | | |
| DPPh | Laki-laki | 237 | | |
| | Perempuan | 98 | | |

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPh | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 57.889 | 61.194 | 720 | 847 | 277 | 180 | 74.623 | 75.332 | 116.124 | 5.004 | 71 | 81,20% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 6 |
| Mobilisasi PNS | 0 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 2 |
| Kampanye Masa Tenang | 0 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 24 | 0 | 420 | 0 |



| | |
|----------------------|---|
| Pencalonan (Tahapan) | 0 |
| SENGKETA | |
| Hasil | 1 |

PELANGGARAN

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Pelanggaran Administrasi | 9 | Pelanggaran Pidana | 9 | Pelanggaran Etik | 0 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 0 |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|

PILKADA DI PROVINSI BALI

Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Bali hanya diselenggarakan di Kabupaten Buleleng dengan anggaran pengawasan sebesar RP 10.210.212.500,00. Anggaran pengawasan tersebut sesuai dengan anggaran yang diajukan oleh pengawas pilkada di Kabupaten Buleleng. Selain itu, pencairan anggaran pengawasan diberikan tepat waktu.

Pilkada di Kabupaten Buleleng melibatkan 1.264 personel pengawas dengan komposisi berupa 1.056 orang laki-laki dan 208 orang perempuan. Hasil pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada di kabupaten tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam tahapan kampanye. Sebaliknya, pada tahapan

pemungutan suara, pengawas berhasil menemukan 54.777 Form C6 yang tidak terdistribusikan dan 423 kasus kerusakan logistik.

Di samping itu, hasil pengawasan memperlihatkan bahwa terdapat satu kasus pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Berangkat dari catatan pelanggaran tersebut, dikeluarkan satu rekomendasi oleh Panwas. Namun, rekomendasi tersebut tidak berhasil dilanjutkan untuk pengadaan pemungutan suara ulang. Selain itu, terdapat tujuh kasus pelanggaran administrasi dan satu kasus pelanggaran etik. Sementara, pengawas tidak menemukan bentuk pelanggaran pidana dan pelanggaran hukum lainnya.



PROVINSI BALI

Kabupaten Buleleng



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 1 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 10.210.212.500,-

Yang Disetujui

Rp 10.210.212.500,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0



DATA PEMILIH

| | | |
|------|-----------|----------------|
| DPT | Laki-laki | 765.753 |
| | Perempuan | 756.807 |
| DPTb | Laki-laki | 4.114 |
| | Perempuan | 5.141 |
| DPPh | Laki-laki | 247 |
| | Perempuan | 187 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Jumlah Pemilih Pemula | 42.897 |
| Jumlah Pemilih Disabilitas | 223 |
| Jumlah Pemilih TMS | 262.365 |

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPH | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 163.035 | 152.386 | 2.220 | 2.069 | 318 | 94 | 165.573 | 154.549 | 315.087 | 5.035 | 52 | |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 54.777 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 423 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 1 |

| Pemungutan Suara Ulang | |
|------------------------|------------|
| Rekomendasi Panwas | Putusan MK |
| 1 | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 0 |
| Mobilisasi PNS | 0 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 0 |
| Kampanye Masa Tenang | 0 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2 | 142 | 6 | 887 | 199 |



| | |
|----------------------|---|
| Pencalonan (Tahapan) | 1 |
| SENGKETA | |
| Hasil | 0 |

PELANGGARAN

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Pelanggaran Administrasi | 7 | Pelanggaran Pidana | 0 | Pelanggaran Etik | 1 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 0 |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|

PILKADA DI NUSA TENGGARA TIMUR

Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Timur berlangsung di tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata. Anggaran pengawasan yang diajukan oleh Kota Kupang berjumlah Rp 3.987.102.000,00. Namun, anggaran pengawasan tersebut hanya disetujui sebesar Rp 3 miliar. Sementara, anggaran pengawasan yang diterima Kabupaten Flores sebesar Rp 8.880.882.000,00 dari pengajuan sebesar Rp 9.179.532.000,00. Sedangkan, anggaran pengawasan yang disetujui untuk Kabupaten Lembata lebih besar dibandingkan anggaran yang diajukan, yaitu Rp 5.637.724.900,00 dari pengajuan sebesar Rp 5.383.242.000,00. Tidak semua kabupaten/kota tersebut menerima anggaran pengawasan tepat waktu. Kota Kupang menjadi satu-satunya daerah yang mengalami keterlambatan dalam pencairan anggaran pengawasan tersebut.

Personil pengawas pemilu yang ditugaskan di Kota Kupang berjumlah 747 orang laki-laki. Sementara, di Kabupaten Flores Timur terdapat 268 orang laki-laki yang bertugas sebagai pengawas. Begitu pula,

pengawas yang bertugas di Kabupaten Lembata diisi oleh 138 pengawas laki-laki. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat satu dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara, satu dugaan mobilisasi PNS, satu dugaan politik uang, dan satu dugaan kampanye di masa tenang. Terkait pelanggaran yang ditemukan di Kota Kupang, terdapat delapan pelanggaran administrasi dan satu pelanggaran etik. Sedangkan, terkait pemungutan suara terdapat 9.992 formulir C6 yang tidak terdistribusi. Pada pilkada di Kabupaten Flores Timur ditemukan satu dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara, satu dugaan mobilisasi PNS, satu dugaan kampanye hitam, satu dugaan politik uang, satu dugaan kampanye di masa tenang. Pelanggaran pemilu di Kabupaten Flores Timur tidak berbeda dengan pelanggaran yang terjadi di Kota Kupang berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran etik. Demikian pula, hasil pengawasan yang tercatat dalam tahapan kampanye di Kabupaten Lembata terdiri dari satu dugaan penggunaan fasilitas negara, satu dugaan pelanggaran mobilisasi PNS, satu dugaan politik uang, dan tiga kasus pelanggaran administrasi.



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kota Kupang



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 4 | | | | 2 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 3.987.102.000,-

Yang Disetujui

Rp 3.000.000.000,-

Ketepatan Waktu

Keterlambatan Waktu

terlambat
(kurang Rp 500.000.000,-)



DATA PEMILIH

| | | | | |
|------|-----------|---------|-----------------------|----------------------------|
| DPT | Laki-laki | 116.887 | Jumlah Pemilih Pemula | 7.954 |
| | Perempuan | 118.378 | | Jumlah Pemilih Disabilitas |
| DPTb | Laki-laki | 2.582 | | |
| | Perempuan | 2.826 | | |
| DPPh | Laki-laki | 223 | | |
| | Perempuan | 203 | | |

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPH | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 78.846 | 85.359 | 2.648 | 2.648 | 182 | 160 | 81.454 | 85.167 | 164.905 | 1.716 | 172 | 70,10% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|------|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 9992 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 1 |
| Mobilisasi PNS | 1 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 1 |
| Kampanye Masa Tenang | 1 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 334 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 5 | 275 | 22 | 1.842 | 937 |



| | |
|----------------------|---|
| Pencalonan (Tahapan) | 3 |
| SENGKETA | |
| Hasil | 0 |

PELANGGARAN

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Pelanggaran Administrasi | 8 | Pelanggaran Pidana | 0 | Pelanggaran Etik | 1 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 0 |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kabupaten Flores Timur



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 0 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 9.179.532.000,-

Yang Disetujui

Rp 8.880.882.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0



DATA PEMILIH

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| DPT | Laki-laki | 57.158 | Jumlah Pemilih Pemula | 5.926 |
| | Perempuan | 66.851 | | Jumlah Pemilih Disabilitas |
| DPTb | Laki-laki | 718 | | |
| | Perempuan | 813 | | |
| DPPh | Laki-laki | 161 | | |
| | Perempuan | 82 | | |

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPh | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 44.258 | 51.948 | 781 | 812 | 157 | 82 | 56.925 | 66.464 | 121.537 | 1.852 | 168 | 78,90% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 1 |
| Mobilisasi PNS | 1 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 1 |
| Politik Uang | 1 |
| Kampanye Masa Tenang | 1 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | | | 3 | 0 | 57 | 0 | 19 | 0 | 189 | 0 |



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 3

Pelanggaran Pidana 0

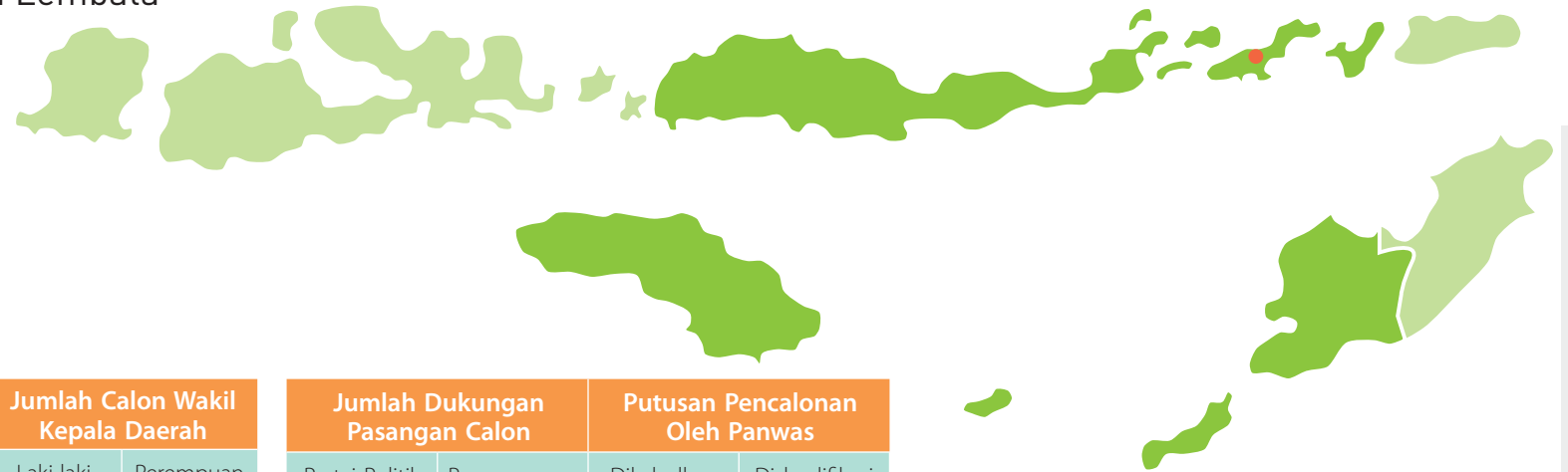
Pelanggaran Etik 1

Pelanggaran Hukum Lainnya 1



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kabupaten Lembata



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 0 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 5.383.242.000,-

Yang Disetujui

Rp 5.637.724.900,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0



DATA PEMILIH

| | | | | |
|------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|
| DPT | Laki-laki | 31.545 | Jumlah Pemilih Pemula | 2.273 |
| | Perempuan | 40.870 | | |
| DPTb | Laki-laki | 998 | Jumlah Pemilih Disabilitas | 75 |
| | Perempuan | 1.061 | | |
| DPPh | Laki-laki | 132 | Jumlah Pemilih TMS | 706 |
| | Perempuan | 44 | | |

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPH | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 26.940 | 34.494 | 990 | 1060 | 130 | 44 | 28.068 | 35.598 | 6319 | 476 | 75 | 86,20% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 1 |
| Mobilisasi PNS | 1 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 1 |
| Kampanye Masa Tenang | 0 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | | | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 99 | 0 |



| | |
|----------------------|---|
| Pencalonan (Tahapan) | 0 |
| SENGKETA | |
| Hasil | 0 |

PELANGGARAN

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Pelanggaran Administrasi | 3 | Pelanggaran Pidana | 0 | Pelanggaran Etik | 0 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 0 |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|

PILKADA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dalam pilkada serentak tahun 2017, di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan Pemilihan Bupati/Walikota di Kabupaten Landak dan Kota Singkawang. Anggaran pengawasan yang diajukan untuk Pilkada Kabupaten Landak sebesar Rp 6.495.777.000,00. Namun anggaran yang disetujui sebesar Rp 5.495.777.000,00. Sedangkan untuk Pilkada Kota Singkawang, anggaran pengawasan yang diajukan adalah sebesar Rp 4,2 Miliar dan yang disetujui sebesar Rp 3.002.995.000,00. Sekalipun tidak semua besaran anggaran yang diajukan disetujui, namun di kedua daerah ini proses pencairan anggaran tersebut tepat waktu.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak, jumlah pengawas yang bertugas sebanyak 1.200 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.183 orang dan perempuan sebanyak 17 orang. Jumlah pengawas dalam Pilkada Kota Singkawang sebanyak 200 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 192 orang dan perempuan sebanyak 8 orang.

Hasil pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak menghasilkan tiga pelanggaran administrasi. Sedangkan di Kota Singkawang, Hasil pengawasan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Singkawang mencatat terdapat satu dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, satu tindakan kampanye dimasa tenang dan satu sengketa pada tahapan pencalonan. Dari proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut tercatat sebanyak lima pelanggaran pidana dan satu pelanggaran etik.



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kota Singkawang



DATA PEMILIH

| | | |
|------|-----------|--------|
| DPT | Laki-laki | 78.078 |
| | Perempuan | 77.436 |
| DPTb | Laki-laki | 1.156 |
| | Perempuan | 1.120 |
| DPPh | Laki-laki | 580 |
| | Perempuan | 383 |

Jumlah Pemilih Pemula

Jumlah Pemilih Disabilitas

Jumlah Pemilih TMS



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 2 | | | | 1 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 4.200.000.000,-

Yang Disetujui

Rp 3.002.995.000,-

Ketepatan Waktu

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPh | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 44.228 | 45.378 | 1.143 | 1.115 | 550 | 375 | 45.921 | 46.868 | 90.771 | 2.675 | 141 | 59,80% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 1 |
| Mobilisasi PNS | 0 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 0 |
| Kampanye Masa Tenang | 1 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 22 | 4 | 156 | |



| | |
|----------------------|---|
| Pencalonan (Tahapan) | 1 |
| SENGKETA | |
| Hasil | 0 |

PELANGGARAN

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Pelanggaran Administrasi | 8 | Pelanggaran Pidana | 5 | Pelanggaran Etik | 1 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 0 |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kabupaten Landak



DATA PEMILIH

| | | |
|------|-----------|---------|
| DPT | Laki-laki | 135.992 |
| | Perempuan | 122.720 |
| DPTb | Laki-laki | 1.403 |
| | Perempuan | 1.349 |
| DPPh | Laki-laki | 214 |
| | Perempuan | 69 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Jumlah Pemilih Pemula | 9.990 |
| Jumlah Pemilih Disabilitas | 263 |
| Jumlah Pemilih TMS | |



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 0 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 6.495.777.000,-

Yang Disetujui

Rp 5.495.777.000,-

Ketepatan Waktu

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPh | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 125.250 | 11.314 | 1.233 | 1.197 | 164 | 59 | 123.853 | 111.884 | 233.927 | 3.544 | 212 | 92,30% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 0 |
| Mobilisasi PNS | 0 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 0 |
| Kampanye Masa Tenang | 0 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 35 | 4 | 140 | 12 | 1.006 | |



| | |
|----------------------|---|
| Pencalonan (Tahapan) | 0 |
| SENGKETA | |
| Hasil | 0 |

PELANGGARAN

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Pelanggaran Administrasi | 3 | Pelanggaran Pidana | 0 | Pelanggaran Etik | 0 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 0 |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|

PROVINSI DI KALIMANTAN TENGAH

Pada Pilkada tahun 2017, terdapat dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menggelar pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Anggaran pengawasan yang diajukan untuk Pilkada Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp 4.062.401.000,00, namun pemerintah daerah hanya menyetujui anggaran pengawasan tersebut sebesar Rp 3.810.299.000,00. Sedangkan untuk Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, anggaran pengawasan yang diajukan adalah sebesar Rp 4.511.141.000,00 dan hanya disetujui sebesar Rp 3.349.736.000,00. Sekalipun tidak semua besaran anggaran yang diajukan disetujui, namun di kedua daerah ini proses pencairan anggaran berjalan tepat waktu.

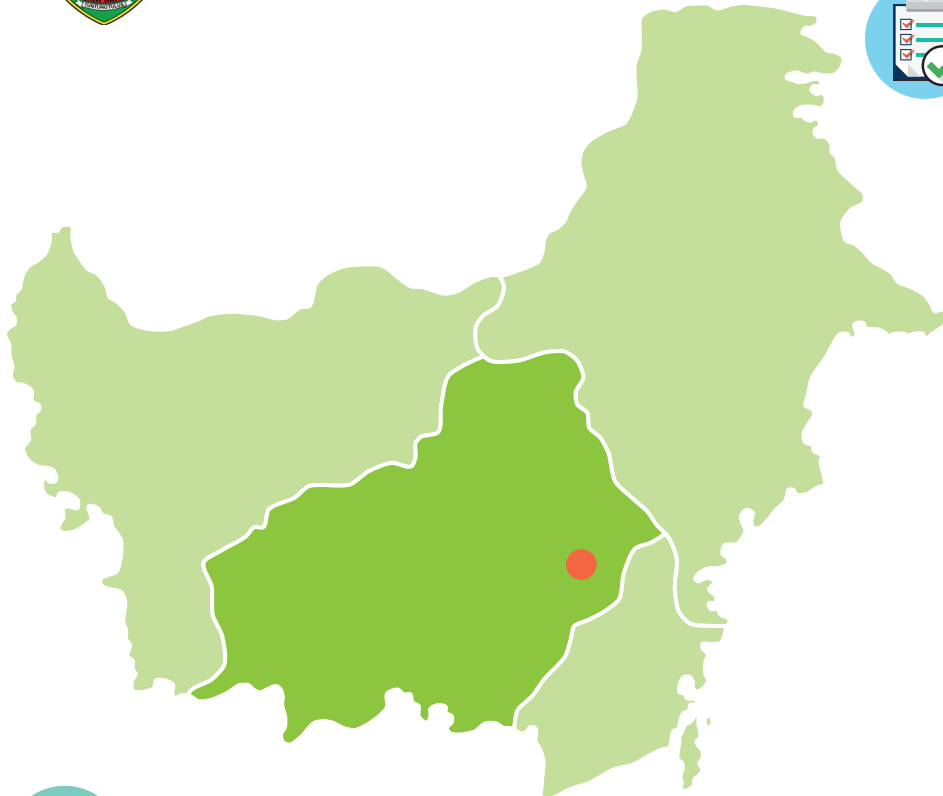
Berkaitan dengan jumlah personel pengawas pemilu, di Kabupaten Barito Selatan jumlah pengawas sebanyak 513 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 444 orang dan perempuan sebanyak 69 orang. Jumlah pengawas dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 694 orang dengan laki-laki sebanyak 556 orang dan perempuan sebanyak 138 orang.

Hasil pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan diperoleh data satu dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, tiga mobilisasi PNS, dan tiga pelanggaran kampanye dimasa tenang. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pada tiga pelanggaran administrasi dan empat pelanggaran hukum lainnya. Sedangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat tiga dugaan pelanggaran terkait penggunaan fasilitas negara pada kampanye, tiga dugaan mobilisasi PNS, tiga dugaan kasus politik uang dan enamdugaan pelanggaran kampanye dimasa tenang. Dari hasil pengawasan pilkada atas dugaan pelanggaran tersebut, terdapat tiga pelanggaran administrasi, tiga pelanggaran pidana dan tiga pelanggaran hukum lainnya.



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kabupaten Barito Selatan



DATA PEMILIH

| | | |
|------|-----------|--------|
| DPT | Laki-laki | 46.923 |
| | Perempuan | 45.475 |
| DPTb | Laki-laki | 1.001 |
| | Perempuan | 1.138 |
| DPPh | Laki-laki | 196 |
| | Perempuan | 126 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Jumlah Pemilih Pemula | 2.675 |
| Jumlah Pemilih Disabilitas | 73 |
| Jumlah Pemilih TMS | |



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 2 | | | | 0 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 4.062.401.000,-

Yang Disetujui

Rp 3.810.299.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPh | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 35.745 | 35.821 | 994 | 1.125 | 195 | 123 | 36.934 | 37.069 | 72.825 | 1.178 | 54 | 80,10% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 1 |
| Mobilisasi PNS | 3 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 0 |
| Kampanye Masa Tenang | 3 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 334 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 5 | 275 | 22 | 1842 | 937 |



| | |
|----------------------|---|
| Pencalonan (Tahapan) | 0 |
| SENGKETA | |
| Hasil | 0 |

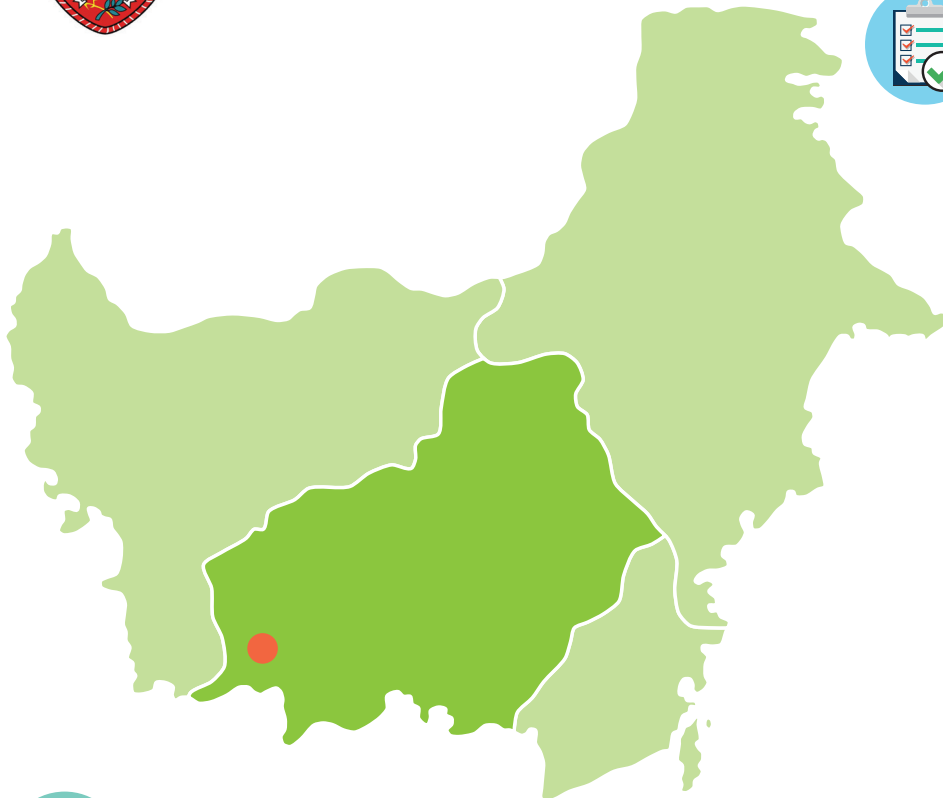
PELANGGARAN

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Pelanggaran Administrasi | 3 | Pelanggaran Pidana | 0 | Pelanggaran Etik | 0 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 4 |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kabupaten Kotawaringin Barat



DATA PEMILIH

| | | |
|------|-----------|--------|
| DPT | Laki-laki | 90.862 |
| | Perempuan | 85.018 |
| DPTb | Laki-laki | 1.959 |
| | Perempuan | 1.879 |
| DPPh | Laki-laki | 165 |
| | Perempuan | 88 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Jumlah Pemilih Pemula | 4.326 |
| Jumlah Pemilih Disabilitas | 63 |
| Jumlah Pemilih TMS | 0 |



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 1 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 4.511.141.000,-

Yang Disetujui

Rp 3.349.736.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPh | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 55.095 | 54.306 | 1.957 | 1.865 | 165 | 88 | 57.217 | 56.259 | 111.332 | 2.144 | 35 | 64,50% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0 |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 0 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 3 |
| Mobilisasi PNS | 3 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 3 |
| Kampanye Masa Tenang | 6 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | | | 3 | 0 | 17 | 1 | 84 | 10 | 452 | 127 |



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 3

Pelanggaran Pidana 3

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 3

PILKADA DI KALIMANTAN SELATAN

Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala. Kedua kabupaten tersebut mendapatkan anggaran pengawasan yang lebih rendah dibandingkan anggaran yang diajukan untuk penyelenggaraan pilkada di masing-masing daerah. Kabupaten Hulu Sungai Utara mengajukan anggaran pengawasan sebesar Rp 5.672.151.000,00. Namun, anggaran yang disetujui sejumlah Rp 4.591.249.000,00. Kondisi yang sama dialami oleh Kabupaten Barito Kuala yang mengajukan anggaran pengawasan sejumlah Rp 5 miliar dan menerima sebesar Rp 4.581.332.000,00. Terlepas dari anggaran pengawasan yang jauh lebih rendah, kedua kabupaten tersebut tidak mengalami keterlambatan pencairan anggaran pengawasan.

Pengawas Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai dari Panwaslu sampai dengan TPS terhitung sejumlah 943 orang yang masih didominasi oleh pengawas laki-laki. Namun, pada tingkat pengawas TPS selisih jumlah pengawas laki-laki dan perempuan tidak terlampaui jauh. Diketahui jumlah pengawas laki-laki di tingkat TPS berjumlah 372 orang dan jumlah pengawas perempuan sebanyak 319 orang. Jumlah personel pengawas di Kabupaten Barito Kuala memang tidak sebanyak pengawas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun, persebaran terbesar jumlah personel pengawas perempuan di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki persamaan. Kedua kabupaten tersebut mempunyai jumlah personel pengawas perempuan terbesar di tingkat TPS. Berdasarkan data yang ada terhitung sebesar 203 orang perempuan sebagai pengawas TPS.

Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah tidak terdapat temuan terkait isu SARA, mobilisasi PNS, kampanye jahat, dan kampanye pada masa tenang, politik uang, dan penggunaan fasilitas negara. Sedangkan di Pilkada Kabupaten Barito Kuala juga tidak ditemukan pelanggaran isu SARA, mobilisasi PNS, kampanye jahat, dan kampanye pada masa tenang. Pada Pilkada Kabupaten Barito Kuala ditemukan 1 dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara, dan politik uang dalam tahapan kampanye. Pada tahapan pemungutan suara, kedua kabupaten tersebut memiliki catatan pelanggaran dalam proses pemungutan suara, yaitu sebesar satu kasus di masing-masing kabupaten. Mulai dari kasus sengketa pencalonan sampai dengan pelanggaran hukum lainnya tidak berhasil ditemukan kasus pelanggaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berbanding terbalik dengan kondisi di Kabupaten Barito Kuala yang menunjukkan bahwa terdapat dua kasus pelanggaran administrasi.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kabupaten Hulu Sungai Utara



DATA PEMILIH

| | | |
|------|-----------|--------|
| DPT | Laki-laki | 77.421 |
| | Perempuan | 81.208 |
| DPTb | Laki-laki | 318 |
| | Perempuan | 372 |
| DPPH | Laki-laki | 114 |
| | Perempuan | 47 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Jumlah Pemilih Pemula | 4.778 |
| Jumlah Pemilih Disabilitas | 260 |
| Jumlah Pemilih TMS | 0 |



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 2 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 5.672.151.000,-

Yang Disetujui

Rp 4.591.249.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPh | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 52.372 | 59.734 | 318 | 327 | 114 | 47 | 52.801 | 60.150 | 104.980 | 7.971 | 100 | 71,70% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0,16% |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 1 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 0 |
| Mobilisasi PNS | 0 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 0 |
| Kampanye Masa Tenang | 0 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 4 | 140 | 79 | 372 | 319 |



| | |
|----------------------|---|
| Pencalonan (Tahapan) | 0 |
| SENGKETA | |
| Hasil | 0 |

PELANGGARAN

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Pelanggaran Administrasi | 0 | Pelanggaran Pidana | 0 | Pelanggaran Etik | 0 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 0 |
|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kabupaten Barito Kuala



DATA PEMILIH

| | | |
|------|-----------|---------|
| DPT | Laki-laki | 109.795 |
| | Perempuan | 109.156 |
| DPTb | Laki-laki | 891 |
| | Perempuan | 1.047 |
| DPPh | Laki-laki | 166 |
| | Perempuan | 83 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Jumlah Pemilih Pemula | 5.486 |
| Jumlah Pemilih Disabilitas | 307 |
| Jumlah Pemilih TMS | 0 |



PENCALONAN

| Jumlah Calon Kepala Daerah | | Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Dukungan Pasangan Calon | | Putusan Pencalonan Oleh Panwas | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Partai Politik | Perseorangan | Dikabulkan | Diskualifikasi |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS | | | | Jumlah Paslon Petahana | | | |
| 0 | | | | 0 | | | |



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 5.000.000.000,-

Yang Disetujui

Rp 4.581.332.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

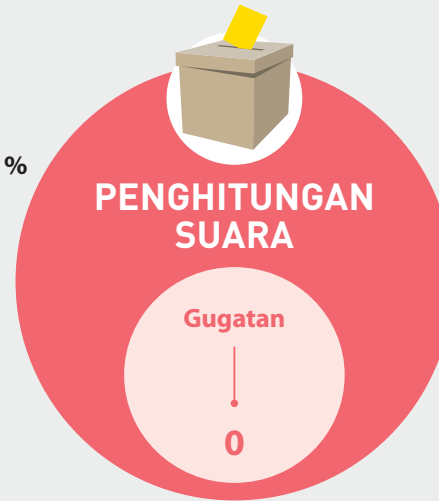
DATA PENGGUNA HAK PILIH

| DPT | | DPTb | | DPPh | | Jumlah Pemilih | | Jumlah Suara | | Jumlah Pemilih Disabilitas | Tingkat Partisipasi |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Sah | Tidak Sah | | |
| 76.165 | 79.345 | 891 | 1.047 | 166 | 83 | 77.221 | 80.469 | 152.115 | 5.575 | 25 | 73,50% |



PEMUNGUTAN SUARA

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| Form C6 Yang Tidak Terdistribusi | 0,11% |
| Kekurangan Surat Suara | 0 |
| Kerusakan Logistik | 0 |
| Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara | 1 |



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Isu SARA | 0 |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 1 |
| Mobilisasi PNS | 0 |
| Kampanye Jahat (Hitam) | 0 |
| Politik Uang | 1 |
| Kampanye Masa Tenang | 0 |

REKRUTMEN PENGAWAS

| Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS) | Bawaslu/Panwaslih | | Panwas Kabupaten/Kota | | Panwas Kecamatan | | PPL | | Pengawas TPS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 5 | 165 | 36 | 383 | 203 |



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 2

Pelanggaran Pidana 0

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 0

